

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Haw Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

M. Gufron H. Kondi K, *Ekosistem Hutan Mnagrove*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Mora Dingin, *Beriasat dengan Hutan Negara*, Jakarta Epistema Institute, 2014.

Nuddin Harahap, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Salim HS, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

### B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang – Uandang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dilakukan perubahan sebanyak 2 kali: Penyempurnaan pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Kehutanan NO. P. 03 MENHUT-V/2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provisinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

### **C. Jurnal**

Fuad anugra dkk, “Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Pantai Di Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong”, dalam *Jurnal Warta Rimba*, Vol. 2, No. 1, 2014.

### **D. Website**

<https://www.mongabay.co.id/2018> diakses pada 07/02/2020, pukul15:30 WIB.

<https://beritagar.id> diakses pada 07/02/2120, pukul03:00